



RESOLUSI **KONFLIK**
ISLAM
INDONESIA

Thoha Hamim, dkk.



RESOLUSI KONFLIK ISLAM INDONESIA

Tim Penulis

© IAIN Sunan Ampel, 2007

x + 316 halaman, 16 x 24 cm

ISBN: 979-9492-24-6

Editor : Thoha Hamim,
Khoirun Niam,
Akh. Muzakki
Penata Isi : Agung Istiadi
Desain Cover : Imam S

Diterbitkan atas Kerjasama:
Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS)
dan IAIN Sunan Ampel, IAIN Press
Jl. A. Yani No. 117
Surabaya 60237

Cetakan I : Agustus 2007

Dicetak oleh:
PT. LKIS Pelangi Aksara
Salakan Baru I/No. 1, Sewon, Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Jogjakarta
Telp.: (0274) 380194, 7472110
Faks.: (0274) 417762
E-mail: elkis@indosat.net.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

Bagian Satu:

PENDAHULUAN

Konflik dalam Perspektif Komunitas Beragama di Indonesia	3-22
<i>Thoba Hamim</i>	

Bagian Dua:

MENDISKUSIKAN KONFLIK DAN MODEL RESOLUSI DARI PERSPEKTIF ETNO-SOSIO-HISTORIS

- 1. Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik
Agama-Etnik:**
Sebuah Diskursus Teoretik 25-35
Masdar Hilmy
- 2. Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik** 37-50
Ahmad Nur Fuad
- 3. Relasi Agama dalam Konflik Sosial** 51-70
A. Fajruddin Fatwa
- 4. Diseminasi Pendidikan Perdamaian Berbasis Agama:**
Gagasan Intensifikasi Konsep *Peace Building* berbasis Agama 71-82
Rubaidi
- 5. Mencermati Fenomena Radikalisme/Terrorisme Agama:**
Perspektif Ilmu-ilmu Sosial..... 83-97
Biyanto

Bagian Tiga:**MENDISKUSIKAN KONFLIK DAN MODEL RESOLUSI
DARI PERSPEKTIF TEOLOGIS**

1. **Konflik Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan:**
Membincang Akar Persoalan dan Signifikansi
Pengembangan Teologi Transformatif..... 101-116
Abd Ala
2. **Konflik, Pluralisme dan Multikulturalisme:**
Dasar Teologis dalam Pengalaman Sejarah Agama 117-127
Achmad Jainuri
3. **Religion:**
A Source of Harmony or Conflict 129-134
Syafiq A. Mughni
4. **Agama, Konflik, Integrasi dan Masyarakat Komunikatif** 135-147
Subermanto Ja'far

Bagian Empat:**MEMBACA REALITAS KONFLIK DAN MODEL
RESOLUSI: Analisis Tekstual**

1. **Ceramah Keagamaan dalam Perspektif**
Speech Act Analysis:
Menggali Akar Konflik Kerukunan Beragama di Indonesia 151-168
Muhammad Thohir
2. **Penyelesaian Konflik Pekerja-Pemodal dalam**
Perspektif Islam 169-182
Ali Mufrodi
3. **Kekerasan Bernuansa Agama di Indonesia dan**
Konsekuensi Pilihan Materi Pendidikan Agama 183-205
Khoirun Niam

Bagian Lima:**MEMBACA REALITAS KONFLIK DAN MODEL
RESOLUSI: Analisis Pengalaman Lapangan**

1. **Ambon Manise:**
Sebuah Upaya Merajut Benang Kusut..... 209-224
Hamadi B. Husain

2. Konflik Setengah Hati dan Integrasi tanpa Konsesi: Kajian tentang Gerakan Pembaruan Nahdlatul Ulama <i>Shonhadji Sholeh</i>	225-246
3. Konflik NU dan Muhammadiyah: Perbedaan Paham Agama dalam Teori Fungsional Konflik <i>Nur Syam</i>	247-260
4. Potret Konflik Lokal Elite Tarekat <i>Sukamto</i>	261-288
5. Jaringan Komunikasi Sosial dan Kerjasama Lintas Agama: Model Pengembangan Kerukunan dan Pengendalian Konflik Antarumat Beragama <i>Luluk Fikri Zuhriyah</i>	289-300
DAFTAR PUSTAKA	301-310
BIODATA PENULIS	311-315

KEKERASAN BERNUANSA AGAMA DI INDONESIA DAN KONSEKUENSI PILIHAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Khoirun Niam

Prolog

Agama dalam konstelasi sosial saat ini menghadapi berbagai tantangan, terlebih dalam kaitannya dengan permasalahan hubungan antara komunitas agama yang berbeda. Menurut Bambang Sugiharto,¹ tantangan itu terdapat tiga hal. (1) Dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang ditandai disorientasi nilai dan degradasi moral, agama ditantang untuk tampil sebagai penyuar moral yang otentik. (2) Agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme. (3) Agama harus tampil sebagai pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, termasuk yang biasanya diciptakan oleh agama-agama itu sendiri. Tiga tantangan pokok, yang oleh Mark Taylor disebut sebagai “trilemma” yang harus dihadapi oleh agama-agama² itu dalam kenyataannya tidak mudah ditanggapi.

¹ Bambang Sugiharto, “Agama antara Berkah dan Kutukan,” dalam Andito (ed), *Atas Nama Agama* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), 29-31. Sebagai pembanding untuk mengetahui lebih lanjut keterangan tentang permasalahan agama di masa kini bisa dilihat literatur berbahasa asing yang diantaranya adalah: Sigrid Brandt, *Religöses Handeln in moderner Welt* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993); Bassam Tibi, *Die Krise des modernen Islam* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991); Bassam Tibi, *Der Islam und das Problem der kulturellen Bewältigung sozialen Wandels* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991); Andreas Meier, *Politische Strömungen im modernen Islam* (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1995); Will Herberg, “The Contemporary Upswing in Religion,” dalam Norman Birbaum dan Gertrud Lenzer, *Sociology and Religion* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1969); Lester R. Kurtz, *Gods in the Global Village* (Thousand Oaks, California: Pine Forge Press, 1995).

² Mark Kline Taylor, *Remembering Esperanza: A Cultural Political Theology for North American Proxixis* (Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 1990), Bab 2.

Usaha menjawab tantangan di atas adalah merupakan suatu hal yang sulit. Kesulitan itu ada karena beberapa faktor. *Pertama*, kemelut dalam tubuh masing masing agama sendiri seringkali memproyeksi keluar. Sikap agresif berlebihan terhadap pemeluk agama lain seringkali merupakan ungkapan yang tak disadari dari *chaos* dan ketegangan dalam tubuh agama itu sendiri. *Kedua*, paham tentang kemutlakan Tuhan yang umumnya dianut hampir semua agama besar juga memudahkan orang untuk mengidentikkan kemutlakan itu dengan kemutlakan agamanya. Keyakinan macam ini, betapapun masuk akal nya, secara psikologis memudahkan orang untuk melegitimasi segala tindakan kekerasannya sebagai “dikehendaki oleh Tuhan.” Membangun sikap yang realistis dan positif terhadap fakta pluralisme dalam pola spiritualitas menjadi makin sulit. *Ketiga*, keyakinan bahwa segala tindakan semacam itu justru akan diberi pahala oleh Tuhan. Demikian ini menyebabkan kekerasan terhadap pemeluk agama lain justru merupakan bagian dari keutamaan moral. *Keempat*, dengan naik daunnya posisi agama dalam konstelasi peradaban kini, agama pun menjadi rawan untuk ditunggangi kepentingan kepentingan politik, ekonomi dan kultural kelompok kelompok tertentu ataupun pribadi. Bila ini terjadi, maka bahaya yang segera dihadapi adalah integritas agama tersebut terancam hancur.³

Melihat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi agama agama itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis. Di antaranya adalah dialog intra religious maupun inter religious: dialog ke dalam maupun keluar perspektif agama masing masing. Pada skala internasional maupun nasional dan lokal, memang akhir akhir ini berbagai bentuk interaksi dialogis itu telah dijalankan dari bentuk bentuk yang sangat formal dan hanya sekedar basa-basi demi kepentingan politik hingga interaksi intensif namun tanpa formalitas ataupun publikasi. Semua itu tentu telah membawa manfaatnya sendiri sendiri. Di samping itu perlu langkah preventif berupa pendidikan agama yang bisa memahamkan makna-makna pluralitas, toleransi dan keberagaman.

Di Indonesia terdapat banyak orang yang menyuarakan orientasi keagamaan yang menghargai pluralitas dan memandang penting dialog antaragama. Sebagai contoh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah seorang di antara banyak tokoh yang mempunyai perhatian terhadap

³ Sugiharto, “Agama antara Berkah dan Kutukan,” 31-32.

hubungan antara umat beragama. Ia sebagaimana yang digambarkan Djohan Effendi, mendambakan kehidupan agama yang ramah. Masing-masing umat beragama dalam pandangannya tentu meyakini kebenaran agama yang mereka anut, sebab hanya dalam keyakinan yang tulus terletak makna keberagamaan yang hakiki, tetapi pada saat yang sama mereka juga seyogianya menghormati orang lain untuk meyakini kebenaran agama yang mereka anut dan melaksanakannya secara bebas. Suasana saling menghormati juga tentu saja berlaku di antara semua pemeluk agama apapun. Ia ingin melihat bahwa di Indonesia yang tumbuh beraneka macam bunga secara wajar tanpa dihalang-halangi tetapi juga tidak dipaksa-paksa. Karena “semangat untuk main *tunggal-tunggalan*”, kata Gus Dur, adalah sesuatu yang menakutkan. Sebab semangat *tunggal-tunggalan* akan membunuh keragaman dan pasti membuat sebagian orang merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan.

Gus Dur mendambakan pergaulan sesama umat beragama, bahkan terhadap mereka yang tidak beragama sekalipun, didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana ia bergaul dengan segala macam orang tanpa melihat perbedaan ras, keturunan, agama, status sosial dan sebagainya. Kalau hal ini bisa tercipta, maka agama benar-benar rahmat bagi semua dan bagi sesama.⁴ Sayangnya setelah ia menjadi presiden, karena yang dominan adalah permasalahan politik yang tiada kunjung habisnya. Cita-cita semacam itu perlu untuk terus diusahakan realisasiannya oleh berbagai kalangan. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan membuat penelitian dan publikasi di bidang keagamaan.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini akan berusaha mengungkap permasalahan agama, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar agama khususnya kekerasan dan kerusuhan yang bersinggungan dengan ranah agama di Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut. (1) Adakah kekerasan dan kerusuhan di Indonesia yang bernuansa agama? (2) Mengapa terjadi kekerasan dan kerusuhan di bumi Indonesia, apakah agama mempunyai kontribusi terhadap munculnya kekerasan dan kerusuhan. (3) Pilihan materi pendidikan agama seperti apa yang minimal harus ada sebagai konsekuensi dari kekerasan dan kerusuhan itu?

⁴ Djohan Effendi, “Kehidupan Umat Beragama dalam Cita-cita Gus Dur,” *Kompas*, 26 November 1999.

Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha mengungkap apa yang terekam dalam media massa, baik dalam bentuk opini yang ditampilkan dan berita yang terkait seputar agama, dan kerusuhan. Pengungkapan dilakukan dengan menerapkan metode analisis teks media yang menggunakan pendekatan kajian tematik atas teks. Analisis teks media yang digunakan dalam penelitian ini tidak mempergunakan analisis kritis, tetapi mempergunakan analisis tematis.

Dalam analisis kritis peneliti melihat terlebih dahulu realitas dan hubungan sosial yang berlangsung dalam situasi yang timpang. Penglihatan atas realitas sosial seperti ini dikombinasikan dengan pemahaman yang perlu dimiliki oleh peneliti bahwa media bukanlah saluran yang bebas. Ia adalah tempat semua kekuatan sosial saling berinteraksi dan berhubungan. Berangkat dari kenyataan seperti ini, media massa bisa saja menjadi sarana kelompok dominan, tidak saja untuk memantapkan posisi mereka, tetapi juga memarjinalkan dan meminggirkan posisi kelompok yang tidak dominan. Mereka dimungkinkan memiliki kesempatan dan akses untuk mempengaruhi dan memaknai peristiwa berdasarkan pandangan mereka. Karena itu dalam penelitian yang menggunakan analisis kritis, penelitian ditujukan untuk menyingkap sumber ketimpangan dan ketidakadilan kemudian berusaha melakukan transformasi sosial untuk mengubah situasi yang dipandang tidak adil.⁵

Sementara dalam analisis teks yang menggunakan pendekatan tematik, peneliti memfokuskan pada produk informasi berupa teks media yang diformat dalam bentuk berita dan opini, sesuai dengan tema yang diinginkan. Opini yang ditampilkan media massa biasanya merupakan kontribusi pengamat dan para ahli di bidang yang mereka kuasai. Sebagai teks media yang telah mengalami berbagai tahap penyuntingan sebelum diterbitkan, maka peneliti menganggap bahwa teks tersebut telah memenuhi kriteria informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan akurasinya. Apalagi teks yang diformat dalam bentuk opini. Teks seperti ini, biasanya merupakan hasil pengamatan dan perenungan dari kontributor yang dilakukan secara mendalam. Karena opini di media massa bisa dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah populer, maka peneliti meyakini bahwa teks media yang

⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 52.

dimaksud tidak perlu diinterpretasi atau dianalisa dengan menggunakan pendekatan kritis, tetapi cukup dianalisa secara tematis.

Adapun langkah-langkah dalam analisis tematis atas teks media dilakukan sebagai berikut. *Pertama*, dikumpulkan teks media yang sesuai dengan tema dari berbagi sumber media. Pengumpulan ini dilakukan atas teks baik dalam bentuk media cetak maupun media eletronik yang bisa diakses melalui internet. *Kedua*, dilakukan penelaahan atas teks melalui proses pembacaan, pemberian tanda dan pencatatan atas masalah-masalah yang sesuai dengan tema yang ingin diangkat. *Ketiga*, dilakukan pengklasifikasian teks ke dalam masalah-masalah yang sesuai dengan ciri, sifat, kronologi dan ruang lingkup bahasannya. *Keempat*, dilakukan penyusunan sub-sub tema yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelaahan dan pengklasifikasian atas teks. *Kelima*, dilakukan penulisan hasil penelitian sesuai dengan sub-sub tema yang telah disusun. *Keenam*, penelaahan kembali atas hasil penelitian. Hal ini penting dalam rangka menguji kembali apakah hasil penyusunan naskah penelitian teks media secara tematis telah dilakukan secara sistematis atau belum.

Rujukan utama tulisan ini adalah artikel opini berbagai media massa dan liputan serta pemberitaan tentang masalah di atas yang datanya dikumpulkan dan dipilih dalam rentang waktu April 1999 sampai Maret 2001. Rentang waktu ini penulis pilih karena di dalamnya terdapat nuansa sosial keagamaan yang mencolok dalam perjalanan sejarah keagamaan di Indonesia. Pada penghujung dekade 90-an dan awal abad 21 ini terjadi banyak peristiwa kerusuhan yang bersinggungan dengan simbol-simbol keagamaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kalau ditengok dari kaca mata sejarah, pertanyaan tentang sejak kapan terjadi kekerasan di negeri ini akan bisa ditemukan jawabannya dengan melihat ke zaman Tunggal Ametung, pada abad XIII Masehi. Saat itu terjadi intrik di istana Tumapel yang berakhir dengan pembunuhan politik. Ken Arok yang membunuh Tunggal Ametung dinyatakan bebas, sedangkan Kebo Ijo yang difitnah mendapat hukuman. Dapat pula diambil contoh lain pada masa-masa sebelum kedatangan orang Eropa.⁶

⁶ Asvi Warman Adam, "Kekerasan dalam Sejarah Indonesia," *Kompas*, 4 Desember 2000.

Kekerasan terjadi bukan hanya di Jawa tetapi juga di kerajaan lain. Pada tingkat elite, sultan Iskandar Muda yang memerintah di Aceh tahun 1607-1636 selain memiliki beberapa kehebatan, dikenal Beaulieu — laksamana Perancis yang pernah berkunjung ke sana— “sangat kejam, karena tega menyiksa perempuan sampai tiga jam lebih”.⁷ Bukan hanya di tingkat penguasa, di kalangan masyarakat, sebelum kedatangan bangsa Eropa, sudah dikenal budaya yang disebut pengamat asing “amok”. Istilah ini masuk ke dalam bahasa Perancis tahun 1832. Namun sebelumnya sudah ada penggambaran tentang “main amok” (*jouoit b Moqua*) itu dalam kesaksian JB Tavernier di Banten tahun 1648. Kisahnya tentang seorang Banten yang berkeliaran di jalan dan membunuh siapa saja yang ditemui sampai ia sendiri terbunuh.⁸

Menurut Henk Schulte Nordholt (*A Genealogy of Violence*) dari Universitas Amsterdam, pemerintahan kolonial Belanda menyumbang banyak dalam munculnya budaya kekerasan di Indonesia. Tahun 1885-1910 sebanyak 100.000 orang - 125.000 orang tewas, jadi korban tentara kolonial (angka itu sama dengan jumlah penduduk Semarang tahun 1910). Korban paling banyak ada di Aceh, karena Belanda mengirim pasukan Marsose yang menewaskan sekitar 75.000 rakyat Aceh atau 15 persen penduduk wilayah itu dalam kurun waktu itu. Tindakan kekerasan itu diambil untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Hindia Belanda.⁹ Meskipun kekerasan yang bersifat sistematis itu baru dimulai pada masa kolonial Belanda, namun seperti disampaikan Onghokham (dalam diskusi terbatas di Bentara Budaya, Jakarta, 20 Mei 2000), korban kekerasan pasca 1965 jauh lebih besar dari masa sebelum kemerdekaan.¹⁰

Dari paparan tentang kekerasan di sepanjang sejarah Indonesia di atas, pelajaran penting yang bisa didapat adalah kekerasan itu ternyata sejak zaman dahulu sudah ada di Indonesia. Kekerasan pada zaman sekarang ini kalau dilihat ke belakang merupakan mata rantai yang di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa “menyambung” dari sisi sejarah. Dalam arti terdapat kesinambungan sejarah di dalamnya. Hal yang patut disayangkan adalah mengapa kesinambungan yang berakibat negatif bagi

⁷ Asvi Warman, “Kekerasan dalam Sejarah.” Asvi Warman mengutip ini dari Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda* (1607-1636).

⁸ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, jilid III dalam Asvi Warman Adam, *Ibid.*

⁹ Asvi Warman, “Kekerasan dalam Sejarah.”

¹⁰ Asvi Warman, “Kekerasan dalam Sejarah.”

masyarakat itu terus ada. Semestinya sebagai masyarakat yang berbudaya, hal sedemikian itu harus dijadikan refleksi kesejarahan yang perlu diikuti dengan usaha untuk memutus “mata rantai” sejarah kekerasan itu atau paling tidak usaha untuk mengeliminasi.

Kekerasan dan Kerusakan Bernuansa Agama

Setelah menengok *record* historis tentang kekerasan di Indonesia, tema penting yang perlu disajikan dari hasil kajian tematis teks media Indonesia adalah tentang kekerasan dan kerusakan yang bernuansa agama. Agama sebagai realitas sosial di dalamnya tidak hanya terkandung aspek ajaran yang bersifat normatif-doktrinal melainkan juga terdapat variabel pemeluk, tafsir ajaran, lembaga keagamaan, tempat suci serta bangunan ideologi yang dibangun dan dibela oleh para pemeluknya. Jika terjadi konflik antar agama, maka terdapat berbagai variabel yang terlibat, yang satu ikut memperkuat yang lain, meskipun ada juga aspek ajaran yang menjadi kekuatan pencegah, yaitu doktrin agama untuk saling menghormati sesama manusia dan misi setiap agama untuk menegakkan kedamaian. Berangkat dari titik pandang ini maka yang dimaksud dengan kekerasan bernuansa agama dalam teks ini adalah kekerasan atau kerusakan yang dianggap memiliki kedekatan — setidaknya pada tingkat simbolik — dengan agama tertentu. Kekerasan atau kerusakan itu mungkin dilakukan oleh umat beragama tertentu, terjadi di wilayah orang yang beragama, atau disulut oleh faktor atau retorika keagamaan.

Telaah teks media ini menemukan beberapa penyebab kekerasan ataupun kerusakan yang bernuansa agama yang terjadi di Indonesia. Pemaparannya akan disajikan secara diskriptif berdasarkan atas apa yang dikemukakan oleh berbagai penulis dan pengamat.

Penyebab

Agama sering dikaitkan dengan fenomena kekerasan, lebih-lebih di Indonesia khususnya pada akhir dekade 90-an dan awal abad ke 21. Sinyalemen ini disanggah melalui pernyataan *apologetis* (membela diri), yakni agama mengajarkan perdamaian dan menentang kekerasan; tetapi manusia menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok sehingga menyulut kekerasan.¹¹

¹¹ Haryatmoko, “Agama: Etika Atasi Kekerasan?” *Kompas*, 17 April, 2000.

Padahal, “agama baru menjadi konkret sejauh dihayati oleh pemeluknya,” kata Haryatmoko.¹² Pertanyaan yang kemudian dapat diajukan adalah “Bisakah memisahkan begitu saja agama dari pemeluknya?” Orang skeptis terhadap jawaban yang membela diri itu. Orang menyaksikan bahwa agama sering digunakan sebagai landasan ideologis dan pembenaran simbolis bagi kekerasan. Oleh karena itu sulit menjawab pertanyaan, bagaimana agama bisa menjadi dasar suatu etika untuk mengatasi kekerasan. Mungkin, upaya transparansi dalam hubungan antar-agama bisa membantu memberi landasan etik untuk mengatasi kekerasan. Namun, menurut Haryatmoko, upaya transparansi ini, dengan pengambilan jarak dan sikap kritis, perlu menyentuh tiga mekanisme pokok yang berperan menjelaskan kaitan antara agama dan kekerasan.

Pertama, fungsi agama sebagai ideologi. Agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. *Kedua*, agama sebagai faktor identitas, dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir dan etos. Ini menjadi lebih kental lagi bila dikombinasikan dengan identitas etnis, yakni Aceh Muslim, Flores Katolik, Bali Hindu, dan sebagainya. Pertentangan etnis atau pribadi bisa menjadi konflik antar-agama. *Ketiga*, agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial. Hal ini bukan sakralisasi hubungan sosial, tetapi suatu tatanan sosial mendapat dukungan dari agama.¹³

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kekerasan yang berlangsung dalam wilayah agama dimungkinkan terjadi akibat praktik-praktik manipulasi interpretasi dan politisasi agama. Hal ini disebut Hery Nugroho sebagai *regime of significance* dalam praktik sosial-politik dan kultural, atau bisa pula terjadi karena persoalan ketidakadilan sosial, kekerasan pemberontakan sipil, represi negara. Pendapat lain menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam wilayah agama dikarenakan belum terjadinya proses kritik yang radikal terhadap seluruh ajaran agama yang dilakukan oleh setiap agamais yang terlibat dalam dialog antaragama, mengingat agama memang memiliki sejumlah doktrin

¹² Haryatmoko, “Agama: Etika Atasi Kekerasan?”

¹³ Haryatmoko, “Agama: Etika Atasi Kekerasan?”

“keramat” yang harus dipegang kuat para pemeluknya. Dengan demikian menyebabkan mereka tidak mampu melampaui wilayah “keramat” tersebut karena mereka termasuk dari bagian agama itu sendiri.¹⁴

Dalam pandangan Marzuki Wachid konflik di wilayah agama pada masa Orde Baru khususnya sejak tahun 1967 hingga akhir 1970-an kalau ditelusuri lebih cermat, maka ada tiga sebab mengapa konflik agama itu sering terjadi. *Pertama*, karena diakuinya secara resmi agama-agama pada masa awal Orde Baru. Hal ini merupakan reaksi balik terhadap peranan PKI pada masa awal orde sebelumnya. Akibat pengakuan ini, terjadi proses intensifikasi penyebaran dan pendalaman agama, yang berpengaruh pada hubungan antar agama itu sendiri. Kontestasi agama-agama dalam merekrut penganut baru menjadi “program” dari agama yang memang sudah terorganisasi (*organized religion*). *Kedua* terjadinya konflik agama disebabkan oleh adanya internasionalisasi kehidupan beragama, termasuk aktivitas penyebarannya. Sejak 1966, seiring dengan *inkorporasi* Indonesia ke dalam sistem dunia, mengalir deras bantuan-bantuan untuk pengembangan semua agama. Jika kalangan Katolik maupun Kristen dana bantuannya datang dari negara-negara di Eropa, maka Islam mendapat bantuan dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Situasi ini memunculkan ketegangan dan bahkan konflik yang terbatas di kalangan agama-agama. *Ketiga*, konsekuensi dari hasil pembangunan Orde Baru itu sendiri. Di kalangan agama-agama, muncul kelas-kelas baru yang ikut mendukung kegiatan keagamaan. Akibatnya di sana-sini muncul kegiatan-kegiatan keagamaan yang semarak, baik yang bersifat fisik maupun ritual formal, berkat dukungan materi yang besar ini. Sering akhirnya, manifestasi-manifestasi keagamaan ini dianggap bersifat eksklusif dan “memanas-manasi”, yang kemudian muncul konflik-konflik sosial, baik antaragama maupun intersekte dalam agama itu sendiri. Dalam konteks sebab ketiga ini, sejak satu dasawarsa lalu, banyak tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan sejenisnya, dibangun bukan karena dorongan keimanan yang mendalam sebagaimana seharusnya, melainkan dimensi politik dan ekonomilah yang terlihat lebih jelas motivasi dari proses pembangunan rumah-rumah ibadah itu.¹⁵

¹⁴ Alamsyah M. Dja'far, “Dekonstruksi Agama untuk Demokratisasi, Catatan untuk Abd. Moqsih Ghazali,” *Media Indonesia*, 16 Pebruari 2001.

¹⁵ Marzuki Wahid, “Dari Dialog ke Kerja Sama Agama-agama,” *Media Indonesia*, 02 Pebruari 2001.

Sementara itu AS Hikam berpendapat, kerusuhan yang bermuatan SARA, khususnya agama, yang terjadi akhir-akhir ini antara lain disebabkan oleh adanya pemanfaatan agama (dikooptasi) sebagai alat legitimasi kekuasaan.¹⁶ “Kerentanan kehidupan keberagamaan kita karena agama tak hanya sebagai dasar kehidupan, tetapi justru telah dikooptasi untuk melegitimasi kekuatan politik. Meskipun demikian, agama tidak dapat dipisahkan dari politik. Masalahnya kita harus merefleksi level keterkaitan antara keduanya”, Peran utama agama dalam politik, menurut Hikam, terletak pada penerapan agama secara inklusif dengan mengambil nilai ajarannya sebagai norma dan moral untuk berpolitik. Hal tersebut, menurut dia berarti menempatkan agama sebagai kendali politik. “Agama sebagai kontrol bagi politik.” Karena itu, umat beragama harus melakukan refleksi pemahaman keberagamaan, yang selama ini masih menjadi kesadaran dalam kalangan elit pemuka agama semata.

Kemampuan agama untuk menjadi motivasi tindakan kolektif manusia memang mengejutkan sekaligus mengerikan di sisi lain, karena agama juga ternyata bisa berfungsi sebagai sumber protes sosial dan radikalisme massa yang cenderung destruktif. Dalam protes sosial dan radikalisme massa sebagai bentuk perlawanan yang anomik dan tak terorganisir, ternyata agama memainkan peran yang lumayan penting. Untuk kasus Indonesia, studi Sartono Kartodirdjo (1962) tentang perlawanan petani di Banten menemukan bahwa kepercayaan akan kedatangan Ratu Adil ternyata bisa membangkitkan sebuah perlawanan yang keras terhadap pemerintah kolonial Belanda.¹⁷

Dengan demikian, ternyata penyebab terjadinya konflik bernuansa agama itu sangatlah bervariasi, tergantung dari konteks sosiologis, politis, ekonomi dan kualitas pemahaman pemeluk agama terhadap doktrin keagamaannya.

Catatan atas Beberapa Kerusuhan Bernuansa Agama

Indonesia, menurut laporan penelitian yang dilansir *Republika*, dalam paruh kedua tahun 1990-an adalah sebuah negeri yang dikoyak oleh gelombang kerusuhan. Banyak di antara kasus kerusuhan itu yang

¹⁶ *Waspada*, Senin, 1 Februari 1999.

¹⁷ *Republika Online* edisi:01 September 1999 Penelitian *Republika* - The Asia Foundation tentang *Islam, Protes Sosial, dan Radikalisme Massa*.

dianggap memiliki kedekatan — setidaknya pada tingkat simbolik — dengan Islam. Setidaknya, dilakukan oleh umat Islam, terjadi di wilayah Muslim, atau disebabkan oleh faktor atau retorika keislaman. Yang terbesar di antara peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa Pekalongan (24 November 1995), peristiwa Situbondo (10 Oktober 1996), peristiwa Tasikmalaya (26 Desember 1996), peristiwa Rengasdengklok (31 Januari 1997), dan peristiwa Banjarmasin (23 Mei 1997).

Berikut ini deskripsi kerusuhan-kerusuhan itu yang merujuk ke laporan Penelitian Republika - The Asia Foundation tentang: *Islam, Protes Sosial, dan Radikalisme Massa*, yang dipublikasikan oleh Republika edisi Online, 1 September 1999.

Kasus Situbondo

Kerusuhan Situbondo yang meletus 10 Oktober 1996 — dikenal dengan “kerusuhan 10-10” — disebabkan dari masalah penghinaan agama Islam oleh santri bernama Sholeh. Sholeh yang bekerja sebagai penjaga masjid, dianggap melecehkan al-Qur’a>n, Nabi Muhammad SAW, dan almarhum KHR As’ad Syamsul Arifin, tokoh paling dihormati di Situbondo. Sholeh juga dituduh menyebarkan ajaran sesat, tarekat Syech Achmad. Kyai Zaini selanjutnya menuntut Sholeh ke pengadilan, setelah pengaduannya tidak direspon Pengurus Cabang NU Situbondo.

Persidanganpun digelar. Akan tetapi berita penghinaan terhadap Islam itu meluas keluar pengadilan. Keributan mulai tersulut pada hari pertama persidangan. Massa berusaha mengadili sendiri Sholeh. Pada persidangan hari kelima, pengunjung makin bertambah. Ada yang menyebut jumlahnya mencapai ribuan.

Ketika Jaksa membacakan putusan hukuman penjara lima tahun, masa tidak puas dan histeris. Keadaan mulai tak terkendali. Aparat kewalahan karena massa makin banyak. Situasi makin panas ketika Dandim Letkol Imam Prawoto memerintahkan anak buahnya melempari massa dengan batu. Sayangnya, lemparan itu terkena kepala seorang anak dan beberapa orang lainnya. Terjadilah saling melempar antara massa dan aparat.

Ribuan massa itu selanjutnya menyebar dan bergerak ke arah Gereja Bukit Sion yang berjarak hanya dua ratus meter dari Kantor Pengadilan. Massa, Selanjutnya membakar gereja setelah merebak isu bahwa Sholeh bersembunyi di gereja itu. Akhirnya bukan hanya Gereja Bukit Sion yang

terbakar. Massa selanjutnya membakar Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Bahtera Kasih yang menewaskan Pendeta Ishak Kristian beserta isteri dan anaknya; lima gereja, satu panti asuhan, dan tiga sekolah Katolik. Kerusuhan juga meluas ke sekitar Situbondo. Toko-toko milik pedagang Cinapun jadi sasaran amuk massa.

Kasus Tasikmalaya

Kerusuhan di Tasikmalaya yang meletus pada 26 Desember 1996 bermula ketika anggota Polres Tasikmalaya menganiaya KH Mahmud Farid, anak KH Makmun - pendiri Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadda'wah di Condong, Cibeureum. Dalam penganiayaan itu, KH Farid mengalami memar di sekujur tubuhnya, di dadanya terdapat bekas sundutan rokok.

Ceritanya berawal dari seorang santri bernama Mohammad Rizal, anak Kopka Polisi Nursamsi, dikenai hukum *ta'zir* karena mencuri uang temannya di pesantren. Rizal adalah "santri kalong" di pesantren itu, kelas dua SMP. Hukuman terhadap Rizal dilakukan oleh dua santri senior, Habib Hamdani Ali dan Ichsan, yang sehari-hari bertugas sebagai keamanan dan ustad di pesantren itu.

Rizal tidak menerima hukuman itu, dan selanjutnya mengadu ke bapaknya. Oleh karena itu, Kopka Nursamsi mendatangi pengurus pesantren dan memprotes hukuman itu. Ia juga mengadukan perkara itu ke Polres Tasikmalaya. Pada tanggal 20 Desember, atas nama pimpinan pondok pesantren, datanglah KH Makmun dan KH Farid memenuhi panggilan Polres. Pihak Polres menolak karena Habib tidak ikut. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember, datanglah KH Farid, Habib Hamdani, Ichsan dan Ate Musoddiq, memenuhi panggilan kedua kalinya. Nursamsi langsung "menjambak" rambut dan memukul ustad yang dianggap menyiksa anaknya.

Bentrokan tak terhindarkan. Mahmud Farid mencoba menurunkan amarah Nursamsi dengan menangkis pukulan polisi itu. Tindakan itu dianggap melawan aparat. Berdatanglah polisi lainnya, ikut menganiaya orang-orang dari pesantren. Kata-kata kasar pun berhamburan dari mulut para polisi itu. Menurut Habib, jumlahnya mencapai 20 orang.

Sekitar pukul 17.00 sore, Kapolres Tasikmalaya datang ke pesantren untuk meminta maaf. Dari kunjungan itu, disepakatilah naskah kesepakatan damai (*ishlah*) yang berisi empat butir. Ke empat butir itu,

antara lain masalah dianggap selesai secara kekeluargaan dan pihak polisi akan mengambil tindakan hukum terhadap anggotanya yang terlibat.

Isu rupanya lebih cepat menyebar. Kedua ustad yang dirawat di rumah sakit, diisukan wafat. Keadaan makin simpang siur seiring merebaknya selebaran dan telepon gelap yang isinya mengajak demonstrasi besar-besaran. Pada tanggal 24 Desember, sekitar 500 mahasiswa dan santri berkumpul di masjid Agung. Mereka menuntut solusi hukum. Pertemuan berjalan alot. Akhirnya para santri dan mahasiswa sepakat unjuk rasa diganti dengan doa bersama. Doa bersama pada tanggal 26 Desember itu ternyata berbuah kerusuhan. Kabar ketidakhadiran Kapolres untuk berdialog, serta merta membuat suasana memanas. Kerusuhan massa pun tak terhindarkan.

Kasus Rengasdengklok

Rengasdengklok dilanda kerusuhan sosial bernuansa kekerasan kolektif, Kamis 30 Januari 1997. Menurut Wakapolres kota itu, massa dan pelaku aksi kerusuhan mencapai sepuluh ribu orang. Sebagian merupakan warga Rengasdengklok, dan sebagian lagi warga luar Rengasdengklok.

Huru-hara pada bulan Ramadhan ini bermula dari pertengkaran mulut antara keluarga Kim Tjoan dan beberapa remaja mushala. Tradisi menabuh beduk memang menjadi kebiasaan pada bulan Ramadhan, terutama saat sahur. Itulah yang terjadi ketika beberapa remaja bergantian menabuh beduk menjelang waktu *imsakiyah*. Kebetulan mushalla itu bersebelahan dengan rumah warga keturunan Cina, Kim Tjoan. Merasa terganggu, Cik Gue menegur pemuda yang memukul beduk itu. Teguran itu dinilai kasar. Terjadilah pertengkaran mulut.

Kim Tjoan lantas meminta bantuan polisi. Polisi datang dan mendamaikan. Polisi itu pulang dengan anggapan urusan selesai. Tapi situasi ternyata tidak reda. Orang kian banyak berdatangan, dan melempari rumah Kim Tjoan. Beredar isu ada orang Cina yang menghina Islam. Kim Tjoan menghubungi polisi, dan diungsikan keluar rumah.

Massa tak dapat dikendalikan. Mereka merusak dan menjarah toko Kim Tjoan. Kerusuhan meluas, massa menyerbu GKI dan Shia Djin Kong. Massa juga membakar gereja Pantekosta, gereja Bethel, dan membakar bangunan-bangunan.

Kerusuhan pun segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Massa membakar habis vihara Surya Adhi Guna. Korban kerusuhan ini tercatat dua vihara rusak dan dibakar; tiga gereja hancur, sebuah lagi jadi arang, 26 mobil rusak, dan tujuh lainnya dibakar. Satu buah motor rusak, 77 rumah penduduk rusak atau terbakar sehingga tidak bisa lagi dihuni. Empat pabrik rusak, satu dibakar; 73 toko rusak, satu dibakar; tiga bank dirusak, satu kompleks sekolah TK/SD Penabur hancur; dan satu bioskop hancur. Tidak ada korban jiwa manusia. Dalam kerusuhan itu aparat negara menangkap 126 pelaku aksi kerusuhan, dan di antara mereka, 55 orang, dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Kasus Pekalongan

Kerusuhan Pekalongan yang dimaksud adalah yang terjadi pada tanggal 26 Maret 1997. Kerusuhan ini dianggap salah satu kerusuhan terbesar di Pekalongan menjelang jatuhnya Orde Baru. Sentimen anti-negara, yang diungkapkan dalam sentimen anti-Golkar, mencuat secara sangat mencolok dalam kasus ini.

Kerusuhan ini terjadi sebagai reaksi atas penyelenggaraan acara “pengajian akbar” yang akan diselenggarakan di sebuah pondok pesantren milik NU, di Buaran, Pekalongan Selatan. Direncanakan akan hadir di acara itu adalah H. Rhoma Irama, Zaenudin MZ, dan Siti Hardiyanti (mbak Tutut). Sebenarnya acara ini merupakan penggalangan massa dan kader Golkar di Pekalongan dalam rangka pra kampanye Golkar di Jawa Tengah.

Kerusuhan disebabkan oleh penurunan bendera-bendera PPP di sekitar pondok pesantren. Penurunan bendera-bendera yang dilakukan oleh para satgas pemda (Kantor Sospol dan Dinas Kebersihan) itu didasarkan pada kesepakatan Pemda dan ketiga OPP dalam rangka penertiban kota untuk persiapan penilaian Adipura. Sikap *overacting* petugas ketika menurunkan bendera menimbulkan kejengkelan. Sementara mereka mencabuti bendera-bendera PPP, mereka membiarkan pemasangan bendera-bendera Golkar di sekitar panggung.

Pada saat dilakukan pencabutan bendera-bendera PPP, tiba-tiba datang sejumlah pemuda yang melempari para petugas dengan batu. Tak lama setelah itu, muncul sekitar seratus orang berbondong-bondong mengejar para petugas yang lari kocar-kacir. Massa kemudian berkumpul dan melakukan arak-arakan yang bergerak ke arah selatan sambil meneriakkan yel-yel PPP.

Entah atas inisiatif siapa, mereka membawa bendera-bendera ketiga OPP ke atas panggung yang sedang dikerjakan. Di atas panggung mereka membakar bendera-bendera itu. Api menjalar di lantai papan panggung dan membakar tenda yang disiapkan untuk penonton. Aksi ini menimbulkan kepanikan di kalangan santri yang sedang belajar di pondok pesantren. Tetapi tidak ada insiden lebih lanjut, kecuali kepanikan warga setempat yang luka-luka akibat lemparan batu.

Malam harinya, di dekat lokasi pondok pesantren diadakan pengajian oleh tokoh-tokoh lokal PPP. Ribuan pengunjung berdatangan menghadiri acara tersebut. Kyai Anwar Fadholi dari Pemalang tampil sebagai penceramah. Ia banyak menyinggung kejadian pembakaran panggung, juga menyinggung ketidaksetujuannya terhadap acara pengajian yang dicampur dengan acara dangdut Rhoma Irama.

Semakin malam pengajian itu semakin panas. Massa yang berdatangan pun semakin banyak. Pengajian usai sekitar pukul 01.00 dini hari, massa bergerak pulang. Mereka meneriakkan yel-yel sambil melempari toko-toko Cina dengan batu. Arak-arakan berlangsung sampai menjelang subuh. Keesokan harinya massa melakukan aksinya kembali dengan merusak panggung. Massa yang jumlahnya ribuan secara bergelombang mulai memasuki Buaran. Massa selanjutnya melakukan kerusakan terhadap kios-kios toko, sebagian besar milik pedagang Cina, yang ada di sepanjang jalan Buaran dan Kradenan. Kerusakan semakin meluas. Massa melakukan pengrusakan dan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan lain, termasuk toko emas, dan kantor BRI. Dua buah mobil truk dibakar. Penanganan aparat yang brutal dan represif menyebabkan massa tambah beringas. Bentrokan terjadi, menyebabkan delapan orang luka parah, termasuk seorang anggota aparat keamanan.

Kasus Pasuruan

Di tengah suasana Pemilu 1997, Pasuruan dilanda rusuh. Amuk massa meletus pada bulan Mei 1997 itu, dalam bentuk bentrokan antara pendukung PPP dan Golkar. Warga Pasuruan melihat perlakuan aparat tidak adil terhadap sesama kontestan. Golkar diberi kesempatan melakukan kampanye arak-arakan secara besar-besaran, sedangkan PPP tidak. Situasi panas mulai terpancing oleh isu adanya pendukung PPP yang akan berangkat shalat Jumat, dipukul polisi sampai pincang. Kemarahan pun mulai tersulut.

Kerusuhan hari Jumat itu berlangsung keras. Massa merangsek ke arah polisi sampai 24 orang polisi terluka terkena lemparan batu dari massa yang mengamuk. Dari pihak massa sendiri, 5 orang dikabarkan terluka akibat ditembak peluru karet yang dilepaskan aparat untuk menghalau mereka. Massa pertama kali merusak pos polisi kemudian membakari mobil polisi dan merusak pertokoan. Dari kerusuhan ini, lima orang ditahan pihak kepolisian.

Kasus Banjarmasin

Kerusuhan melanda Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1997 di tengah suhu politik yang panas dalam Pemilu 1997. Rusuh terjadi pada putaran terakhir masa kampanye, ketika Golkar memperoleh giliran berkampanye. Awal mula kerusuhan terjadi se usai shalat Jumat, di sekitar Masjid Nur, di tengah kota.

Setiap Jumat masjid yang berada di tengah pasar tradisional ini diikuti jamaah hingga ke jalan raya. Shalat Jumat belum selesai sepenuhnya, jalan bekas shalat jamaah belum lagi kosong, tiba-tiba ada arak-arakan sepeda motor dengan raungannya yang mengganggu.

Insiden itu akhirnya memicu kerusuhan terbesar sepanjang sejarah Banjarmasin. Kerusuhan ini menelan korban sangat besar: lebih dari seratur orang (menurut Komnas HAM, 123 orang) meninggal dunia, 1 gereja musnah dan 10 rusak berat, 151 rumah musnah terbakar, 144 buah toko, 3 pusat perbelanjaan dan hiburan, 2 pasar swalayan, 5 bank, 4 kantor pemerintah, 1 sarana hiburan, 3 sekolah, 1 rumah jompo, 1 apotik, 36 mobil dan 34 sepeda motor. Sungguh merupakan tragedi. Hal ini belum termasuk mereka yang luka-luka akibat bentrokan, penganiayaan, tertembak, atau mereka yang hilang.

Kasus Ujung Pandang

Kerusuhan massa di Ujung Pandang diawali oleh pertengkaran mulut antara Benny Karre, warga keturunan Cina, dengan penjual molen, pada malam (sekitar pukul 19:45 WITA) tanggal 15 September 1997. Pertengkaran ini berujung dengan mengamuknya Benny dan menyebabkan seorang Anni Mujahidah Rasunah (9 tahun) menjadi korban, tewas terbunuh.

Berita ini segera menyebar ke seluruh kota. Massa yang tinggal di sekitar tempat kejadian sudah memenuhi lokasi. Saat itulah muncul

sentimen anti Cina, umpatan-umpatan bernada anti Cina. Suasana makin panas dan massa mulai rusuh.

Malam itu juga, massa mulai bergerak dan membuat kerusuhan di sekitar tempat tinggal Anni. Kerusuhan dilanjutkan keesokan paginya. Suasana tegang ditunjang harian terbesar di Ujung Pandang yang menulis: “Anak pulang mengaji dibunuh”, dan sikap aparat keamanan yang terkesan membiarkan terjadinya kerusuhan — sekalipun tidak sama sekali tak berusaha memadamkannya.

Hubungan etnis Cina dengan pribumi di Ujung Pandang, sekalipun sebelumnya tidak pernah muncul ke permukaan sebagai persoalan, dipenuhi prasangka. Bangunan-bangunan etnis Cina sering dipasang pagar besi tinggi-tinggi dengan kunci berlapis. Prasangka lain mengatakan bahwa para pejabat mengistimewakan etnis Cina dari pada pribumi. Prasangka ini —dengan banyak bumbu cerita— beredar luas, termasuk di kalangan mahasiswa. Tampaknya mahasiswa tak bisa mengambil posisi imparisial dalam kerusuhan massa di Ujung Pandang ini. Kerusuhan berbau rasial kemudian berkembang menjadi kemarahan di tempat-tempat maksiat.

Dari berbagai kerusuhan massa yang telah digambarkan di atas, terdapat temuan dari proses penelitian tentang “Islam, Protes Sosial, dan Radikalisme Massa” bahwa akar masalah yang menjadi penyebab berlangsungnya peristiwa kekerasan di atas bukanlah dorongan agama *parexcellence*, melainkan akumulasi persoalan sosial, ekonomi, politik, bahkan psikologis yang sudah lama terpendam dan tidak menemukan saluran pemecahan yang memadai. Dalam hal ini, faktor keislaman hanyalah pemicu (trigger)-nya, yang digunakan untuk menyalurkan ketidakpuasan dalam wilayah yang jauh lebih luas

Melihat faktor pemicu terjadinya kerusuhan, lebih sulit mengatakan bahwa motivasi sosio-ekonomi menjadi determinan satu-satunya dalam kerusuhan massa. Pada dua kasus (Pasuruan dan Banjarmasin) pemicunya adalah bentrokan politik semasa kampanye, khususnya antara pendukung PPP dan Golkar. Pada kasus Ujung Pandang dan Rengasdengklok faktor etnis menjadi pemicu. Hubungan-hubungan kerja tidak pernah secara langsung menjadi pemicu yang menggerakkan massa Islam melakukan rusuh. Rusuh-rusuh tersebut selalu menemukan manifestasinya dalam pemicu yang lebih banyak bersifat kultural maupun religius.

Dengan melihat pola-pola kerusuhan maupun faktor pemicu, penelitian Republik Indonesia menyimpulkan bahwa motivasi sosio-ekonomi tidak relevan untuk menjadi determinan utama terjadinya kerusuhan massa Islam sepanjang tahun 1997-an. Akan tetapi mengabaikan motivasi sosio-ekonomi dalam melihat perilaku rusuh massa Islam, juga mengandung bahaya.¹⁸

Pilihan Materi Pendidikan Agama: Konsekuensi Adanya Kekerasan dan Kerusuhan

Dalam rangka memberikan alternatif pencegahan terjadinya kekerasan dan kerusuhan di masa yang akan datang, maka salah satu pendekatan yang bisa di kemukakan adalah melalui jalan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Yang perlu disadari adalah pendidikan agama bukan semata sebagai sarana untuk meredakan kerusuhan. Pendidikan agama bertujuan untuk penanaman akidah, nilai, norma dan ritual keagamaan. Di samping itu pendidikan agama juga ditujukan untuk pelestarian tradisi dan praktik-praktik agama. Hal penting lain dari tujuan pendidikan agama adalah untuk memberikan pemahaman dan penanam sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan agama.

Di antara tujuan-tujuan di atas yang relevan untuk dibahas dalam artikel ini adalah yang berhubungan dengan tujuan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan umat yang berlainan agama. Tujuan itu bisa dicapai bila didukung oleh beberapa faktor penting dalam proses pendidikan. Faktor-faktor itu di antaranya tujuan pendidikan, adanya materi yang tepat, metode dan media pendidikan, evaluasi dan guru yang profesional. Tulisan ini hanya akan memfokuskan pada faktor materi pendidikan agama. Sebaik apapun tujuan pendidikan dan metode yang disampaikan tetapi kalau tidak didukung oleh pemilihan materi yang tepat, maka tujuan pendidikan tidak akan bisa tercapai secara maksimal.

Materi pendidikan agama yang tepat bisa diambil dari berbagai sumber yang diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, materi pendidikan agama yang bersumber pada pesan (*message*) keagamaan. Dalam Islam materi ini bersumber pada pesan-pesan al-Qur'ân maupun sunnah. *Kedua*, materi pendidikan agama yang bersumber pada fakta, realita ataupun lingkungan sekitar. Materi ini bisa berupa fakta-fakta historis dan praktik-

¹⁸ Ibid.

praktik interaksi sosial keagamaan yang telah terjadi dalam komunitas tertentu untuk dijadikan bahan penglihatan, perbandingan dan perenungan. Selanjutnya, sisi-sisi positif yang terkandung di dalamnya bisa ditransfer dalam kehidupan nyata.

Materi yang bersumber pada pesan agama (al-Qur'ân) dapat dikemukakan sebagai berikut. (1) Materi yang berhubungan dengan pengakuan al-Qur'ân akan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan (lihat al-Baqarah/2:148 dan al-Mâ'idah/5:48). (2) Materi yang berhubungan dengan pengakuan koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama (lihat al-Mumtahanah/60: 8-9; al-Anfâl/61; dan al-Baqarah/2:208). (3) Materi yang berhubungan dengan keadilan dan persamaan (lihat an-Nisâ'/4:135; al-Mâ'idah/5: 8; al-Nahl/16:90; al-Hadîd/57: 25). (4) Materi yang berhubungan dengan perintah menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama (lihat al-Nisâ'/4: 86; al-An'âm/6:108; al-'Ankabût/29: 46). (5) Materi tentang kerjasama antar sesama umat beragama (lihat al-Mâ'idah/5: 2; Âli 'Imrân/3: 28; al-Nisâ'/4: 89, 139; al-Mâ'idah/5: 51, 57; al-Tawbah/9: 23; al-Mumtahanah/60: 1, 13).

Sedangkan materi yang bersumber pada fakta dan realita historis dapat dicontohkan praktik-praktik interaksi sosial yang diterapkan Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralisme dan toleransi. Hal itu bisa ditelusuri dari Piagam Madinah. Sebagai salah satu produk sejarah umat Islam, Piagam Madinah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu beberapa ahli tentang Islam menyebut hal ini sebagai loncatan sejarah (*historical jump*) yang luar biasa.

Dalam hal ini Nurcholish Madjid menyarankan: "... menghadapi masa depan bangsa kita, khazanah wawasan kenegaraan dan kemasyarakatan Madinah baik sekali dijadikan rujukan dan teladan: Hal ini dirasakan amat mendesak bagi masyarakat, mengingat akhir-akhir ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tiadanya kesejatan dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai madani. Disebabkan oleh adanya trauma-trauma masa lalu, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat

lain di seluruh dunia, khususnya di Barat, sebagian golongan masyarakat merasa enggan merujuk kepada ajaran keagamaan untuk mencari otentisitas dan keabsahan sejati bagi pandangan-pandangan kemasyarakatan dan kenegaraan”¹⁹

Hal yang penting untuk diteladani dicontohkan oleh Nurcholish Madjid berkenaan dengan masalah pluralisme —suatu unsur amat asasi dalam masyarakat madani sebagaimana diletakkan dasar-dasarnya oleh nabi— kita dapatkan bahwa masyarakat kita masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan kurang sejati. Istilah “pluralisme” sudah menjadi wacana umum nasional. Namun dalam masyarakat ada tanda-tanda bahwa orang memahami pluralisme hanya sepintas lalu, tanpa makna yang lebih mendalam, tidak berakar dalam ajaran kebenaran.²⁰

Bagaimana membumikan ide tentang pluralisme ini? Dalam hal ini Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai sesuatu bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam. Pluralisme adalah suatu perangkat untuk mendorong pengkayaan budaya bangsa.²¹

Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam al-qur’ân justru disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia untuk memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia. *Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam.*²²

¹⁹ Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,” *Republika*, 10 Agustus 1999.

²⁰ Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi.”

²¹ Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi.”

²² Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi.”

Hal lain yang harus diteladani menurut Nurcholish Madjid adalah masalah toleransi. Toleransi menurutnya adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat” dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar. Hikmah atau manfaat itu adalah sekunder nilainya, sedangkan yang primer ialah ajaran yang benar itu sendiri. Sebagai sesuatu yang primer, toleransi harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu — bisa jadi untuk diri kita sendiri — pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang “enak.”²³

Sejarah Nabi Muhammad berhasil merumuskan landasan toleransi antar pemeluk agama dengan dimasukkannya secara khusus dalam Piagam Madinah sebuah pasal spesifik tentang toleransi. Secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 25: “Bagi kaum Yahudi (termasuk pemeluk agama lain selain Yahudi) bebas memeluk agama. Mereka, dan bagi orang Islam bebas pula memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku pada pengikut pengikut atau sekutu sekutu mereka dan diri mereka sendiri”

Dasar toleransi umat beragama dalam Piagam Madinah memiliki kekuatan hukum yang sangat substansial dan mendasar. Ide Piagam Madinah adalah murni bersifat Islami karena secara derivatif berakar pada nilai al-Qur’ân. Allah berfirman dalam surat *al Kâfirûn/109:6*, yang artinya: “Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku.”

Kalau dilihat dari sebab sebab turunnya, ayat ini merupakan penolakan Nabi Muhammad secara diplomatis dan etis atas propaganda agama lain. Ketika ditawarkan untuk saling bertukar agama, nabi menanggapi dengan arif dan bijaksana, “*Bagimu agamamu, bagiku agamaku.*” Tidak konfrontatif, apalagi destruktif sehingga orang yang mengajaknya pun semakin segan.

Toleransi Muhammad yang demikian tinggi ini menjiwai atas berbagai tindakan dan kebijakan lainnya, termasuk ketika perang. Pernah suatu ketika, Muhammad mengutus Usamah ibn Zaid untuk memimpin ekspedisi peperangan. Sebelum berangkat beliau berpesan kepada Usamah agar pasukan kavaleri dan infanteri yang dipimpinnya tidak melakukan perusakan terhadap tumbuh tumbuhan, tidak membunuh

²³ Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi.”

anak anak, ibu ibu, orang tua, serta tidak merusak rumah ibadah umat agama lain, baik gereja, sinagog, maupun kuil.

Pesan nabi ini penting justru karena disampaikan dalam situasi orang dihinggapi perasaan emosional untuk menghabiskan segala yang dimiliki lawan. Dengan mengambil pemahaman tersiratnya, sikap toleransi terhadap yang lain dalam kondisi aman tidak berperang menjadi lebih penting bahkan wajib.

Sikap nabi yang demikian ini juga diwarisi oleh panglima panglima Islam, seperti Umar bin Khattab, Usman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga panglima perang Shalahuddin al Ayyubi dari Palestina. Panglima panglima ini sangat menghargai pihak lawan dengan membuka pintu maaf dan pertolongan yang sangat besar ketika lawan sudah dalam kondisi lemah dan tak berdaya.

Materi-materi yang bersumber pada pesan agama dan fakta yang terjadi di lingkungan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan kisi-kisi minimal dalam rangka memberikan pemahan terhadap keberagaman umat manusia dan untuk memunculkan sikap positif dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam proses pendidikan sudah semestinya materi itu disesuaikan dengan tingkatan dan jenjang pendidikan. Artinya sumber buku, bacaan dan bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat intelektual peserta didik di masing-masing tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar akan lebih tepat dengan menggunakan bahasa sederhana dengan metode penyampaian penuturan dalam bentuk kisah-kisah kehidupan nabi Muhammad. Untuk tingkat pendidikan lanjutan materi dipilih dengan menyajikan fakta-fakta historis dan pesan-pesan al-Qur'ân yang lebih kongkrit serta memberikan perbandingan dan perenungan atas realita yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Untuk tingkat pendidikan tinggi di samping ayat-ayat al-Qur'ân beserta tafsir yang disajikan juga perlu dikemukakan bukti historis berupa teks piagam Madinah. Kemudian materi dianalisa dan dibandingkan dengan permasalahan aktual sambil didiskusikan alternatif penyelesaian dari permasalahan yang sedang terjadi.

Epilog

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa (1) Bila ditengok dari sejarah, kekerasan dan kerusuhan di Indonesia itu sudah terjadi sejak

zaman dahulu. (2) Pada dekade akhir tahun 90-an terdapat berbagai kekerasan dan kerusuhan bernuansa agama di Indonesia. Yang terbesar di antara peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa Pekalongan (24 November 1995), peristiwa Situbondo (10 Oktober 1996), peristiwa Tasikmalaya (26 Desember 1996), peristiwa Rengasdengklok (31 Januari 1997), dan peristiwa Banjarmasin (23 Mei 1997). (3) Sebagai penyebab terjadinya konflik bernuansa agama itu ternyata sangatlah bervariasi, tergantung dari konteks sosiologis, politis, ekonomi dan kualitas pemahaman pemeluk agama terhadap doktrin keagamaannya.

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: (1) Perlu dilakukan pemilihan materi pendidikan agama yang tepat untuk mereduksi kemungkinan tindak kekerasan dan kerusuhan bernuansa agama yang akan terjadi di masa depan. (2) Materi yang penting untuk mencapai tujuan di atas dapat bersumber pada pesan agama dan fakta historis maupun lingkungan sekitar. (3) Tingkat kerumitan materi harus disesuaikan dengan tingkat intelektual peserta didik. (4) Dalam rangka merealisasikan saran-saran ini perlu dilakukan pembuatan silabi yang lebih kongkret. □

MEMBACA REALITAS KONFLIK
DAN MODEL RESOLUSI:
Analisis Pengalaman
Lapangan